

# PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME; *Mengikis Sikap Radikalisme, Rasisme, dan Diskriminisme*

Oleh Robiah Hidayah Siregar

**Abstract :** Pada saat ini, pendidikan multikultural menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dielakkan. Pendidikan multikultural merupakan sebuah model pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan yang selama ini sudah ada. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membedakan etnik, ras dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

**Kata Kunci;** Pendidikan Multikultural, Transformasi, Pendidikan Islam

# PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME; *Mengikis Sikap Radikalisme, Rasisme, dan Diskriminisme*

Oleh Robiah Hidayah Siregar

## **Pendahuluan**

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan *side effect* yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi dan kapitalisasi dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam dan sebagainya. Ditambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik antar golongan, antar suku dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Ahmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa,

Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada

substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

## Pengertian Pendidikan Multikulturalisme

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”.<sup>1</sup> Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut –baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*)<sup>2</sup>

Atha' Mudzhar mendefinisikan multikulturalisme sebagai suatu konsep yang merujuk pada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralitas budaya. Budaya adalah istilah yang merujuk pada semua aspek

---

<sup>1</sup>Scott Lash & Mike Featherstone (ed), *Recognition and Difference; Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), hlm. 2-6.

<sup>2</sup>Charles Taylor. “The Politics of Recognition” dalam Amy Gutman. *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*, (Princeton: Princeton University Press, 1994), hlm. 18.

simbolik dan dapat dipelajari tentang masyarakat manusia termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan adat istiadat.<sup>3</sup>

Pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya.

Selanjutnya, Sonia Nieto berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terrefleksikan diantara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultur ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajarmengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan *pedagogi* kritis, refleksi dan menjadi basis aksi perubahan

---

<sup>3</sup>M.Atha' Mudzhar, *Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikultural di Indonesia dalam Harmoni*, Jurnal Multikultural dan Multiregelius, vol.III. No II, h. 11.

dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.<sup>4</sup>

Pembelajaran berbasis multikulturalisme berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat. Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis.

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

Di samping itu, pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan; yang bertujuan untuk: (1) membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; (2) memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain.

---

<sup>4</sup>Sonia Nieto. *Language, Culture and Teaching*, (Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2002), hlm. 29.

# Pendidikan Multikulturalisme dalam Lintasan Sejarah

## 1. Pada Masa Rasulullah

Salah satu tujuan strategis dari agama Islam adalah *Rahmatan Lil 'Alamin*. Pernyataan Alquran ini sangat mendasar dan implementasinya dapat lebih dipahami melalui hukum-hukum Islam dan seluruh doktrin keagamaan yang tidak lepas dari rujukan dasar tersebut.<sup>5</sup>

Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk manusia seluruhnya. Ini berarti bahwa Muhammad harus mampu menjalankan tugasnya sebagai rahmat untuk sekalian alam beliau harus mampu mengakomodir segala bentuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan dimarjinalkan. Kebijakan yang sangat penting yang diambil oleh Nabi ketika berada di Madinah adalah beliau mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Madinah yang teertuang dalam piagam Madinah yang sangat fantastis. Ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam menjaga kerukunan dan kedamaian umat manusia (masyarakat Madinah)

## 2. Masa Dinasti Umayyah

Maju mundurnya sebuah pemerintahan sangat tergantung kepada pemegang kekuasaan. Pada periode ini khalifah adalah kepala Negara. Oleh karena itu kualitas seorang khalifah memberi contoh tersendiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan diberbagai bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak (masyarakat) yang dipimpinya. Demikian pula dalam mengatasi berbagai krisis dan gejolak yang muncul dalam pemerintahannya, pendidikan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan.

Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah pendidikan kurang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu

---

<sup>5</sup> Muhammad Thalhan Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio cultural*, Jakarta, LAntabora Press, 2005, h.27

pengetahuan. Hal ini bisa jadi karena politik yang dijalankan oleh khalifah Bani Umayyah. Politik Arabisasi yang begitu mengakar selama periode Umayyah mengakibatkan sempitnya ruang gerak bagi para pencari ilmu untuk mengembangkan ilmu. Hampir di seluruh bidang kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, politik ini begitu kental. Walaupun demikian politik ini juga memberikan dampak yang positif, khususnya tentang pengembangan bahasa arab, sehingga pada periode ini penggunaan dan perkembangan bahasa Arab begitu meluas.

### 3. Masa dinasti Abbasiyah

Pada dinasti Abbasiyah ini, upaya penelusuran konsep dasar pendidikan multikulturalisme dimulai pada zaman al-Ma'mun dengan pertimbangan bahwa pada masa kekhalifahannya adalah dinasti ini mengalami masa kejayaan, dan al-Ma'mun terkenal sebagai tokoh intelektual yang gigih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengelola lembaga pendidikan *Bayt al-Hikmah*.

Kebijakan khalifah Al-Ma'mun dalam bidang pendidikan ialah bagaimana ia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mau belajar di daerah kekuasaannya. Bahkan ia tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan yang di panggil dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan warisan Yunani, Hellenisme, Persia dan India. Bagi Al-Ma'mun tidak mempermasalahakan dari mana asalnya ilmu pengetahuan itu, asalkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan akan diambil dan di anggap bermanfaat. Dengan sistem yang sangat terbuka inilah pada masanya kejayaan dan kemakmuran khususnya dalam bidang pendidikan sampai pada puncaknya.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Al-makmun adalah mendirikan institusi pendidikan tinggi yaitu "*Bait al-Hikmah*" pada tahun 830 M. Di mana *bayt al-Hikmah* ini merupakan

institusi pendidikan tinggi islam yang pertama didirikan.<sup>6</sup> Institusi ini telah mengulir sejarah baru dalam peradapan manusia di mana bangsa-bangsa Barat sekalipun belum mengenalnya apa yang disebut multikultural dalam pendidikan. Dikatakan demikian karena objek toleransi terhadap perbedaan etnis kultural dan agama sudah dikenal dan merupakan hal yang biasa. Konsep demokrasi dan pluralitas sudah begitu kental dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan pendidikan di institusi ini.

Ada dua konsep dasar multikultural dalam institusi ini, yaitu:

*Pertama*, nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan, toleransi, dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penterjemahan buku-buku sains dari Yunani kedalam bahasa Arab untuk melengkapi institusi ini. Al-Makmun telah memberikan kebebasan, kesetaraan, dan keterbukaan pada para sarjana muslim maupun non muslim dan memberikan penghargaan yang sama dengan membayar mahal dengan kepingan emas sehingga mereka merasa nyaman dan tujuan-tujuan tercapai.<sup>7</sup> Karena interaksi yang positif antara Muslim dan non Muslim hanya akan terjadi dalam suasana yang penuh kebebasan.<sup>8</sup> Nilai-nilai toleransi begitu kuat yang merupakan nilai strategis di dalam membangun dasar perdamaian dan kedamaian.

*Kedua*, Perbedaan etnik kultural dan agama bukan halangan dalam melakukan penterjemahan. Banyak sarjana yang menterjemahkan buku-buku Yunani dan Persi adalah orang-orang non Muslim yang berbeda kultur dan etnik, seperti: Alan al-Syu'ubi yang berkebangsaan Persi, Yuhanna bin Masuya

---

<sup>6</sup>Asar, *Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 109.

<sup>7</sup>Suwito & Fauzan (Ed), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005 ), h.28-29

<sup>8</sup>Nurcholis Majid, *Islam doktrin dan Peradapan: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Kemodernan*, Jakarta, Paramadina, 2000, h.222



berkebangsaan Syiria, Qutha bin Luqa beragama Kristen Yacobite dan lain-lain.<sup>9</sup>

Selain di *bayt al-hikmah*, konsep pendidikan multikulturalisme juga terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Hanya saja konsep pendidikan multikulturalisme terlihat lebih bersifat internal dan khusus lebih menekankan pada spek keragaman dan kesederajatan peserta didik dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, subjek-subjek pendidikan multikulturalisme yang dapat dilihat pada institusi pendidikan Islam seperti: Kuttab, mesjid, ribath, dan halaqah. Gambaran adanya konsep dasar pendidikan multikulturalisme di instansi selain *bayt al-hikmah* sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan tergambar dalam proses belajar mengajar di institusi mesjid. Murid mempunyai kebebasan dalam memilih materi pelajaran dan gurunya.
2. Nilai-nilai keadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan kelompok minoritas tanpa proses rekrutmen. Murid-murid yang tidak mampu murid-murid yang yatim diberikan kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu.
3. Nilai-nilai keadilan dan hubungan yang harmonis tergambar dalam hubungan guru dan murid dalam proses belajar mengajar.<sup>10</sup>

## **Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia**

Wacana multikulturalisme untuk konteks di Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, keadaan negara menjadi kacau balau dengan berbagai konflik antar suku bangsa dan antar golongan, yang menimbulkan keterkejutan dan kengerian para anggota masyarakat. Kondisi yang demikian membuat

---

<sup>9</sup>Suwito, *Sejarah Sosial*, h.29.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 30-31.

berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem nasional seperti apa yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah, serta sistem apa yang bisa membuat masyarakat Indonesia bisa hidup damai dengan meminimalisir potensi konflik.

Kondisi tersebut di atas, dilengkapi pula dengan sistem pemerintahan yang kurang memperhatikan pembangunan kemanusiaan pada era terdahulu, kebijakan pemerintah didominasi oleh kepentingan nasional dan stabilitas nasional. Sektor pendidikan dan pembinaan bangsa kurang mendapat perhatian. Pada saat itu, masyarakat takut berbeda pandangan, sebab kemerdekaan mengeluarkan pendapat tidak mendapat tempat; kebebasan berfikir ikut terpasung, pembinaan kehidupan dalam keragaman nyaris berada pada titik nadir.

Gerakan repormasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme orde baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemai berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil yang multikulturalisme radikal sebagaimana yang kini diakomodasi undang-undang Sisdiknas. Paradigma multikultural secara implisit telah menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Sehingga, Wawasan Multikultural harus ditumbuhkan untuk meredam konflik yang kerap terjadi ditengah masyarakat. Menumbuhkan nilai sosial yang baik ditengah lingkungan multikultur tidak datang dengan sendirinya akan tetapi harus dimulai dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan Multikultur sudah menjadi tuntutan ditengah keragaman dan mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip "bhineka tunggal ika" seperti yang tercantum dalam dasar negara akan terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga

cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Mengingat pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkannya. Kita perlu menyebarluaskan pemahaman dan mendidik masyarakat akan pentingnya multikulturalisme bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain kita memerlukan pendidikan multikulturalisme yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mantan Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar (2004) pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal ini, maka pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut.

1. Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah bhineka tunggal ika, suka gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Betapa dapat dilihat dalam potret kronologis bangsa ini yang sarat dengan masuknya berbagai suku bangsa asing dan terus berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Misalnya etnis cina, etnis arab, etnis arya, etnis erofa, etnis afrika dan sebagainya. Semua suku itu ternyata secara kultural telah mampu beradaptasi dengan suku-suku asli negara Indonesia. Misalnya suku jawa, batak, minang, bugis, ambon, papua, suku dayak, dan suku sunda.

---

<sup>11</sup>diupload oleh DNS, *Dalam Kategori Bidang Harmonisasi Umat Beragama*, Minggu-29-10-2011.

2. Pendidikan multikultural memberikan secerah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspeknya dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan multikultural yang tidak menjadikan semua manusia sebagai manusia yang bermodel sama, berkepribadian sama, berintelektual sama, atau bahkan berkepercayaan yang sama pula.
3. Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang beroreintasi bisnis. Pada saat ini, lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi berlomba-lomba menjadikan lembaga pendidikannya sebagai sebuah institusi yang mampu menghasilkan income yang besar. Dengan alasannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Padahal semua orang tahu, bahwa pendidikan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia bukanlah pendidikan keterampilan belaka, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan.yang sering dikenal dengan nama kecerdasan ganda (multiple intelligence).
4. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran kedamaian sudah tidak ada lagi. Kekerasan tersebut sebagai akibat dari akumulasinya berbagai persoalan masyarakat yang tidak diselesaikan secara tuntas dan saling menerima. Ketuntasan penyelesaian berbagai masalah masyarakat adalah prasyarat bagi munculnya kedamaian. Fanatisme yang sempit juga bisa meyebabkan munculnya kekerasan. Dan fanatisme ini juga berdimensi etnis, bahasa, suku, agama, atau bahkan sistem pemikiran baik di bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pendidikan multikultural adalah merupakan upaya memperluas payung pendidikan multietnik sehingga memasukkan isu-isu lain seperti relasi jender, hubungan antar agama, kelompok

kepentingan, kebudayaan, dan subkultural serta bentuk-bentuk lain dari keragaman. Dalam kaitan inilah sejak dekade 1970-an sampai 1980-an kita menyaksikan munculnya berbagai tema sebagai wujud dari berbagai gerakan yang intinya adalah merupakan pendidikan multikultural seperti gagasan tentang kesetaraan jender, pendidikan dwi-bahasa, gerakan terhadap kesadaran terhadap ketidakadilan dan lain sebagainya.

Ada empat nilai inti dalam pendidikan multikultural yaitu:

- a. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat
- b. Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia
- c. Pengembangan dunia
- d. Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Berdasarkan nilai-nilai inti di atas maka dapat dirumuskan enam tujuan pendidikan multikultural, yaitu:

1. Mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat
2. Memperkuat kesadaran budaya yang hidup dimasyarakat
3. Memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat
4. Membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka
5. Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi
6. Mengembangkan aksi sosial

Menurut Hernandez, paling tidak ada empat pendekatan yang dilakukan untuk pendidikan multikulturalisme, yaitu: (1) Pendekatan

kontribusi; (2) Pendekatan tambahan; (3) Pendekatan transformasi; dan (4) Pendekatan aksi sosial.<sup>12</sup>

Sementara itu, H.A.R. Tilaar menggariswahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu, *pertama*, pendidikan multikultural haruslah berdismensi “*right to culture*” dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat*, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada *xenophobia*, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama. *Kelima*, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada. *Keenam*, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural<sup>13</sup>

Prinsip multikulturalisme sebenarnya telah menjadi acuan bagi pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai

---

<sup>12</sup>Farida Hanum, *Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, dalam [http://www. Pendidikan Multikulturalisme](http://www.PendidikanMultikulturalisme), diakses pada Sabtu-29-10-2011.

<sup>13</sup>H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 185-190.

kebudayaan nasional, sebagaimana yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: "*Kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah*". Oleh karena itu prinsip multikulturalisme dapat dijadikan strategi dan pendekatan dalam merajut hubungan antara warga yang mempunyai keragaman budaya, juga dapat dipakai sebagai perangkat analisis atau perspektif guna memahami dinamika keanekaragaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku bangsa, rasial, golongan dan agama.

### **Multikulturalisme dalam Pendidikan Nasional**

Untuk membahas permasalahan ini, pemakalah merasa perlu pelacakan terhadap konsep formal pendidikan nasional. Konsep ini berada pada peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta turunannya berupa peraturan pemerintah, keputusan menteri, surat edaran dirjen, serta petunjuk teknis tentang pendidikan. Tetapi, di sini pemakalah hanya akan dilacak dari sumber UU No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kata lain. Sistem pendidikan nasional merupakan sistem yang dibangun di atas landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan sumber sekaligus cita-cita ideal bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, selain landasan konstitusional, sekaligus merupakan norma operasional dari Pancasila. Pancasila sebagai idiologi terbuka, diyakini memiliki nilai multikultural. Nilai ini bisa dimaknai dari setiap sila Pancasila. Nilai abstrak multikultural dalam Pancasila menjadi agak konkrit semangatnya dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat (1), "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia untuk menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.<sup>14</sup>

Sampai batas dokumen konstitusi UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional memiliki dimensi pendidikan multikultural. Begitu juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 kita melihat pendidikan multikulturalisme ini sudah terwadahi, seperti yang tertera Pasal 3 UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya pasal 4 yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan berbunyi, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Prinsip ini dikonkritkan dalam pasal 37 tentang kurikulum yang menyatakan bahwa salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni dan budaya.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui konsistensi turunannya ke dalam peraturan pemerintah, dikemukakan hasil pelacakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang baru diundangkan pada tanggal 28 Januari 2010. Dalam peraturan ini, ditemukan dimensi pendidikan multikultural sebagai berikut:

1. Pasal 67 ayat (3) huruf d, pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ... toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab;

---

<sup>14</sup>Undang-undang Dasar 1945.

<sup>15</sup>Depag RI, *Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (2006), h. 8-26.



2. Pasal 77, pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang... toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab;
3. Pasal 84 ayat (2) pendidikan tinggi bertujuan ... toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;<sup>16</sup>

Berdasarkan rumusan pada UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif sistem pendidikan nasional memiliki dimensi pendidikan multikultural.

Selama ini nuansa pendidikan multikulturalisme sudah diberikan di sekolah melalui beberapa pendekatan,<sup>17</sup> sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Seperti pada pendekatan pertama dan kedua (pendekatan kontribusi dan pendekatan tambahan), kita melihat bahwa dalam beberapa mata pelajaran dulu dan sekarang telah menunjukkan kepentingan untuk keanekaragaman masyarakat. Misalnya, materi-materi berisi himbauan atas toleransi beragama seperti yang terdapat dalam mata pelajaran PPKN.

Menurut penelusuran Kamanto dalam kurikulum KBK tahun 2004 sudah ada mata pelajaran yang berisi pendidikan multikulturalisme seperti pendidikan sosiologi. Garis besar materi pelajaran sosiologi bagi siswa SMA menyebutkan bahwa fungsi pendidikan sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berperilaku, dan berintegrasi dalam realitas sosial dan budaya yang bermacam-macam atas dasar etika, nilai dan norma, serta tujuan praktisnya meliputi pengembangan ketrampilan perilaku, sikap kritis, dan rasional siswa dalam menghadapi berbagai

---

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

<sup>17</sup>Ada empat pendekatan yang dilakukan untuk pendidikan multikulturalisme, yaitu: (1) Pendekatan kontribusi; (2) Pendekatan tambahan; (3) Pendekatan transformasi; dan (4) Pendekatan aksi sosial

macam situasi sosial, kebudayaan, masyarakat dan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Jadi, apa yang terdapat dalam kurikulum pendidikan sosiologi SMA di atas, walaupun hanya dalam bagian tertentu saja dari keseluruhan kurikulumnya, namun pendidikan multikulturalisme yang ada telah melaksanakan pendekatan level ketiga dan keempat (pendekatan transformasi dan aksi sosial). Seandainya pun pendidikan multikulturalisme tidak masuk dalam kurikulum inti ini sebagai mata pelajaran tersendiri, materi-materi pendidikan multikulturalisme dapat masuk pada bagian tertentu dari mata pelajaran bidang studi-bidang studi yang ada di sekolah, itu sudah sangat membantu siswa dan mahasiswa dalam mendapatkan dan memahami pendidikan multikulturalisme.

## **Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam**

Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, mengatakan bahwa “lembaga pendidikan Islam perlu menekankan pendidikan multikultural. Sebab, pendidikan multikultural memberikan kesadaran dan kedewasaan menyikapi perbedaan. “Perlu untuk menyadarkan kita hidup di tengah perbedaan,”<sup>19</sup>

Islam, lanjut Menag, mengajarkan pengakuan atas nilai-nilai dan penghargaan multikultural. Dalam agama ditekankan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan dan bagian dari ketentuan Tuhan. Keberagaman juga bukan faktor pemicu konflik. Sebaliknya, ragam perbedaan itu adalah modal utama untuk saling berkonsolidasi dan mempererat silaturahmi.

Meski pendidikan multikultural penting, Menag menegaskan, tidak berarti lembaga pendidikan Islam menghadapi krisis multikulturalisme. Fakta yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Islam justru

---

<sup>18</sup>Kamanto, dkk, *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia; Stepping into the Unfamiliar*, (Yogyakarta: Kanisius. 2000), h. 53.

<sup>19</sup>Tulisan berjudul "[Menag: Pendidikan Islam Tidak Krisis Multikulturalisme](#)" dipublikasikan oleh [Admin ISPI](#) (Saturday, 4 June 2011 (13:53)) pada kategori [Pemerintahan/kemendiknas](#).

menunjukkan adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan. Di pesantren, misalnya, santri berasal dari berbagai suku, bahkan kewarganegaraan. Fakta yang sama juga terlihat di masyarakat. Menurut Menag, pemahaman masyarakat terhadap multikulturalisme masih sangat baik. Indikasinya cukup kuat. Jika terjadi krisis pemahaman multikultural, tiap hari akan terjadi konflik horizontal di masyarakat. Tetapi faktanya, hal itu tidak terjadi. “Saya kira kita tidak minim (multikulturalisme).”

Meski pemahaman mengenai multikulturalisme perlu ditingkatkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, belum perlu merumuskan kurikulum khusus tentang pendidikan multikultural. Kurikulum pendidikan Islam yang ada saat ini dianggap sudah mengajarkan multikultural.

Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag). Muhammad Ali bahwa pendidikan multikultural mesti menekankan pada aspek perbaikan dan pematapan sikap affective multikulturalis yang memengaruhi perilaku anak didik, terutama dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menegaskan, nilai-nilai multikultural itu secara lugas sudah termaktub dalam agama Islam. “Kalau memahami ajaran Islam pasti multikulturalis.” Namun, ia mengakui, langkah menerapkan dan menyukseskan pendidikan multikultural bukan hal yang mudah. Hal itu harus didukung dengan kesiapan kualitas sumber daya manusia para pengajar. Tantangan utama mereka adalah menyesuaikan pengajaran dan penyampaian materi mereka terhadap ajaran Islam yang benar.<sup>20</sup>

Pendidikan agama yang berlangsung di sekolah diharapkan bukan sekadar penanaman wacana melalui proses indoktrinasi otak, tetapi melatih terampil beragama dan kesiapan menghadapi masalah konkret dalam masyarakat berupa perbedaan. Pendidikan agama *an sich* semacam *fiqih*, *tafsir* tidak harus bersifat tunggal, namun menggunakan pendekatan lainnya. Ini menjadi sangat penting, karena anak akan senantiasa memiliki pilihan sikap yang jelas atas dua pilihan yang berbeda, dan perbedaan yang ada tentu membutuhkan alasan perbedaannya. Misalnya

---

<sup>20</sup>Ibid.

tentang alasan cara wudhu yang berbeda, atau bisa juga tentang cara membaca satu kata tafsir namun memiliki makna yang banyak.

Untuk mengembangkan kecerdasan sosial berupa proses interaksi sosial, siswa juga harus diberikan materi pengenalan lintas agama atau ideologi tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antar agama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam. Sebagai contoh, tentang “puasa” yang ternyata juga dilakukan oleh pemeluk agama lain, seperti para biksu atau agamawan lain. Program ini menjadi sangat strategis, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa puasa ternyata juga menjadi ritual agama lain. Dalam upaya memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam bisa juga menanamkan kepedulian komunitas agama lain dengan saling bekerjasama membersihkan tempat keagamaan, wihara ataupun tempat suci lainnya. Kesadaran multikulturalisme bukan sekadar memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap konkrit bahwa sekalipun berbeda keyakinan, namun sama-sama sebagai manusia yang mesti diperlakukan secara manusiawi. Hal ini seperti melatih peserta didik untuk bisa berbagi dengan orang terdekatnya.

Tentunya, kesemua program di atas dapat berjalan dengan baik manakala didukung adanya materi aqidah akhlak yang telah diintegrasikan dengan dunia sosial nyata. Selama ini, materi pendidikan agama dipandang hanya memproduktif manusia yang memandang golongan lain (tidak seakidah) sebagai musuh. Maka di sinilah perlunya menampilkan pendidikan agama yang fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan *tauhid*, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan.

### **Multikulturalisme sebagai landasan kerukunan umat beragama**

Kerukunan umat beragama sangat kita perlukan, agar kita semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antaragama, seperti

memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Agenda-agenda tersebut, jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, jika masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta menjelaskan meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini dapat mempunyai dampak yang amat mendalam dan cenderung meluas. Bahkan implikasinya bisa sangat besar sehingga berisiko sosial, politik maupun ekonomi yang besar pula.

Dalam penyosialisasian, penegakan, dan penyuburan kerukunan umat beragama ini, sebetulnya pemerintah melalui Departemen Agama menduduki posisi yang penting dan sangat menentukan. Sebagai departemen yang diberi tugas mengatur dan menangani persoalan serta urusan keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya Depag harus terus membuka mata dan memperhatikan masalah-masalah kehidupan umat beragama, baik yang berskala kecil maupun besar. Problem itu, tentunya sangat berkaitan dengan relasi umat agama di Indonesia yang terdiri atas multiagama, multiorganisasi, multiperspektif.

Sudah banyak kebijakan pemerintah mengatur pembinaan kerukunan hidup umat beragama; baik mengenai kebijaksanaan penyiaran agama, pendirian dan penggunaan rumah ibadah, upacara hari besar keagamaan, hubungan antaragama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah, dan wadah musyawarah antarumat beragama.

Pemerintah sejak 1970-an sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia. Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan pentingnya dialog antaragama dan ilmu perbandingan agama yang diajarkan sebagai mata kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kedua hal itu penting, sebagai bentuk penyiapan kader-kader dan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan konflik antara agama dan pemikiran yang terbuka,

berwawasan luas, serta mendahulukan solusi kebersamaan demi masa depan Indonesia.

Upaya ini dilanjutkan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara yang menyosialisasikan pentingnya trilogi kerukunan umat beragama. *Pertama*, kerukunan antarumat beragama, yaitu kerukunan dan saling menghormati di antara pemeluk berbagai agama. *Kedua*, kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan di antara golongan-golongan dalam satu agama tertentu. *Ketiga*, kerukunan di antara semua kelompok keagamaan dan pemerintah.<sup>21</sup>

Yang juga penting adalah bagaimana agar kerukunan umat beragama itu tidak terus bersifat top-down, elitis, dan berhenti pada dialog formal dan seremonial saja. Kerukunan umat beragama memang harus didorong dan diberikan motivasi oleh pemerintah, juga hendaknya diupayakan penyediaan fasilitas untuk mendukung itu. Akan tetapi, para pemuka agama harus juga berinisiatif agar kesadaran ini terus tersebar dalam level grassroots dan menjadi bagian dari pentingnya menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Misalnya, pemberdayaan kelembagaan Islam untuk meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama perlu diprogramkan terencana dan berkelanjutan, yang diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa di berbagai daerah kabupaten maupun kota.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk pemerintah pada setiap provinis, kabupaten, dan kota perlu dioptimalkan dan diluruskan. Karena dalam kenyataannya, badan ini menjelma acap menjadi pengawas berdirinya rumah ibadah. Selain wewenangnya, efek ikutannya juga patut diawasi. Karena birokratisasi perukunan agama-umat dirukunkan secara resmi melalui alat-alat negara- justru melahirkan ketidakrukunan baru. Ini, antara lain, bisa dilihat dari betapa marak-nya

---

<sup>21</sup>Zainuddin, M Daulay, "Mereduksi Eskalasi Konflik Antar Umat Beragama Di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2001.

perusakan tempat ibadah justru ketika FKUB sudah terbentuk di mana-mana. Tugas utama FKUB seperti termuat dalam Perber pasal 9, yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Berikut ini merupakan landasan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai dasar sikap kerukunan antar umat beragama:

### 1. Landasan Idiil

Sila pertama dalam Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

### 2. Landasan Konstitusional

- UUD 1945, pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- UUD 1945 pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

### 3. Landasan Strategis

Ketetapan MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000, disebutkan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

### 4. Landasan Operasional

- UU No. 1/PNPS/1965 mengenai larangan dan pencegahan penghinaan agama
- Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 01/Ber/Mdn/1969 mengenai pelaksanaan

aparap pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dalam pengembangan ibadah pemeluk agama.

- SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 01/1979 mengenai tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.
- Surat edaran Menteri Agama RI No. MA/432/1981 terkait perhelatan peringatan hari besar keagamaan.

Landasan-landasan hukum di atas menjadi tolak ukur penerapan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 juga menyinggung tentang penyiaran agama sebagai *rule of game* atau aturan main bagi pelaksanaan dakwah dan pengembangan tiap-tiap agama, demi terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama.<sup>22</sup>

Dapat dilihat bahwa pemerintah benar-benar menaungi dan mengayomi kehidupan umat beragama di Indonesia, dengan memberi aturan atau pedoman, serta melindungi kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut ketentuan masing-masing. Sikap seperti ini sudah seyogyanya diambil oleh pemerintah selaku penentu kebijakan dan pengurus tertinggi negara, demi mendukung serta memotivasi masyarakat agar senantiasa mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, supaya terhindar dari permusuhan dan mengarah pada kedamaian dalam lingkup nasional.

Kedamaian ini nantinya akan memperteguh stabilitas dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, kesadaran tiap-tiap warga negara akan pentingnya mengusahakan dan melestarikan kerukunan antar umat beragama sangat dibutuhkan.

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, "Kebijakan Departemen Agama dari Masa Ke Masa, Dalam Kurun Setengah Abad", Badan Litbang Keagamaan Depag, Jakarta, 1996.



## Kesimpulan

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membedakan etnik, ras dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka.

Dunia pendidikan tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural tersebut. Bila tidak disadari, jangankan dunia pendidikan turut mempunyai andil dalam menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Oleh karena itu, di tengah gegap gempita lagu nyaring "tentang kurikulum berbasis kompetensi", harus menyelip dalam rasionalitas kita bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan "ini" dan "itu", tetapi juga mendidik anak kita menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. Dengan demikian, tidak saatnya lagi pendidikan mengabaikan realitas kebudayaan yang beragam tersebut.

---

**Robiah Hidayah Siregar** adalah dosen pada STAI Nurul Falah Air Molek Rengat